

ANALISIS KEBUTUHAN DAN KEBIJAKAN PENDIRIAN BUMD : STRATEGI PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DI WILAYAH KONSESI TAMBANG

Suhardi M. Anwar¹; Hadi Pajariant²; Ilham Tahier³; Serli Tangmallun⁴

Universitas Muhammadiyah Palopo, Indonesia^{1,2,3,4}

Email : manwarsuhardi@umpalopo.ac.id¹; hadipajariant@umpalopo.ac.id²;
ilhamtahier@umpalopo.ac.id³; serlit61@gmail.com⁴

ABSTRAK

Pendirian Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) merupakan strategi yang diarahkan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Artikel ini mengkaji kesesuaian antara kebutuhan daerah dan potensi sektor pertambangan sebagai dasar kebijakan pendirian BUMD. Tujuan penelitian ini adalah untuk memetakan prioritas strategi dan upaya peningkatan PAD, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini menggunakan pendekatan *Analytical Hierarchy Process* (AHP) yang memiliki kemampuan untuk memetakan informasi secara terstruktur dan memberikan gambaran menyeluruh tentang posisi suatu organisasi untuk mendapatkan bobot prioritas terbaik dalam pengambilan keputusan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PAD dapat ditingkatkan dengan prioritas strategi, yakni; *pertama*, pendirian BUMD sebagai strategi pertama, fasilitasi tenaga kerja untuk sertifikasi sebagai skenario kedua, monitoring lingkungan sebagai strategi skenario ketiga. Pertambangan selain berkontribusi terhadap pendapatan asli daerah juga berpotensi merusak lingkungan. Oleh karena itu, pada AHP jelas bahwa monitoring lingkungan juga menjadi salah satu prioritas teridentifikasi.

Kata Kunci : Analisis; BUMD; PAD; Konsesi; Tambang

ABSTRACT

The establishment of a Regionally Owned Enterprise/Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) is a strategy aimed at increasing Regional Original Income (PAD). This article examines the similarities between regional needs and the potential of the mining sector as the basis for the policy of establishing a BUMD. The purpose of this study is to map strategic priorities and efforts to increase PAD, thereby improving community welfare. This study uses the Analytical Hierarchy Process (AHP) approach, which has the ability to map information in a structured manner and provide a comprehensive overview of an organization's position to obtain the best priority weighting for decision-making. The results show that PAD can be increased with priority strategies, namely: first, the establishment of a BUMD as the first strategy, facilitating labor certification as the second scenario, and environmental monitoring as the third strategic scenario. Its role, besides contributing to regional original income, also has the potential to damage the environment. Therefore, the AHP clearly identifies environmental monitoring as one of the identified priorities.

Keywords : Analysis; BUMD; PAD; Concession; Mining

PENDAHULUAN

Pertambangan masih menjadi sektor unggulan dalam perekonomian Indonesia. Dalam kurun waktu sepuluh tahun terakhir, industri ini berhasil menyumbang sekitar Rp1.800 triliun dalam bentuk Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), mencerminkan peran strategisnya di bawah Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Pemerintah Daerah memiliki kewenangan melakukan pendirian Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang diharapkan dapat meningkatkan sumber PAD (Rizky Syaputra et al., 2023). Kebijakan pendirian BUMD harus didasarkan pada analisis yang komprehensif terhadap kebutuhan daerah dan potensi sumber daya yang dimiliki, termasuk potensi pertambangan. Dengan demikian, penelitian ini dapat menjadi acuan dalam perencanaan kebijakan yang mendukung pertumbuhan ekonomi daerah (Yanto et al., 2023). Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1 angka 20 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Pendapatan Asli Daerah (PAD) diartikan sebagai pendapatan yang bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta pendapatan lain yang sah sesuai dengan regulasi yang berlaku. Peta kawasan pertambangan sebagaimana disajikan pada gambar 1.

Untuk mewujudkan penerimaan PAD Kabupaten Luwu Timur melalui hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan tersebut, dapat dilakukan antara lain melalui pendirian BUMD (Siahaan et al., 2022). Seiring dengan perubahan peraturan perundang-undangan di Indonesia, khususnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah serta adanya keinginan Pemerintah Daerah untuk memiliki BUMD yang seluruh modalnya dimiliki daerah dengan komposisi saham 100% (seratus persen) milik Pemerintah Kabupaten Luwu Timur sehingga kebijakan pendirian BUMD sangat dibutuhkan. Hal ini sejalan dengan evaluasi kebijakan pendirian BUMD bahwa investasi yang cukup besar dan prospek bisnis perhotelan di Ibu Kota Negara dipandang akan sangat berpotensi memberi kontribusi terhadap peningkatan pendapatan asli daerah (Putra et al., 2021).

Kajian ini sangat urgen bagi Kabupaten Luwu Timur sebagai salah satu daerah yang memiliki potensi pertambangan yang cukup besar, terutama untuk komoditas mineral seperti nikel. Namun, pemanfaatan potensi pertambangan tersebut belum

optimal dalam mendukung peningkatan PAD. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebutuhan daerah dan potensi pertambangan di Kabupaten Luwu Timur, serta implikasinya terhadap kebijakan pendirian BUMD dalam upaya meningkatkan PAD di Kabupaten Luwu Timur. Kabupaten Luwu Timur memiliki potensi geologi yang menonjol di sektor energi dan sumber daya mineral. Berdasarkan kondisi geologinya, wilayah ini menyimpan cadangan mineral strategis seperti nikel, bijih besi, marmer, batu gamping, dan bahan galian industri lainnya. Eksistensi nikel telah terbukti melalui kegiatan eksploitasi jangka panjang oleh PT Vale Indonesia Tbk. Potensi laterit besi juga melimpah, umumnya ditemukan pada lapisan limonit, sementara nikel lebih dominan di lapisan saprolit. Selain itu, terdapat potensi silika dalam bentuk batuan rijang dari Kompleks Melange Wasuponda (MTmw), yang telah dimanfaatkan sebagai bahan campuran dalam proses pemurnian nikel.

Dalam rangka memperoleh *state of the art* dan kebaruan, peneliti melakukan pelacakan terhadap riset sebelumnya. Diantaranya adalah temuan bahwa kontribusi BUMD terhadap PAD cukup signifikan dapat meningkatkan perekonomian daerah (Daerah et al., 2022), banyak potensi daerah yang belum dimanfaatkan untuk peningkatan PAD (Nugroho, 2020), dan belum adanya BUMD yang mengelola potensi pertambangan (Prasada, 2023). Pertumbuhan dan pengelolaan BUMD yang baik akan mampu meningkatkan laba yang dihasilkan sehingga dapat memberikan nilai tambah ke PAD yang akan berperan sangat penting dalam perekonomian daerah dan dapat meningkatkan PDRB dan efektivitas desentralisasi fiskal (Syahrudi & Amalia, 2024). Kontribusi BUMD terhadap PAD cukup signifikan dapat meningkatkan perekonomian daerah (Daerah et al., 2022), banyak potensi daerah yang belum dimanfaatkan untuk peningkatan PAD (Nugroho, 2020), dan belum adanya BUMD yang mengelola potensi pertambangan (Prasada, 2023). Pertumbuhan dan pengelolaan BUMD yang baik akan mampu meningkatkan laba yang dihasilkan sehingga dapat memberikan nilai tambah ke PAD yang akan berperan sangat penting dalam perekonomian daerah dan dapat meningkatkan PDRB dan efektivitas desentralisasi fiskal (Syahrudi & Amalia, 2024).

Kebaruan dari kajian ini adalah penggunaan pendekatan pemecahan masalah melalui Analytical Hierarchy Process (AHP) yang memiliki kemampuan untuk memetakan informasi secara terstruktur dan memberikan gambaran menyeluruh tentang posisi suatu organisasi untuk mendapatkan bobot prioritas terbaik dalam pengambilan

keputusan (Chandra & Ratnamurni, 2022). Proses ini hasil akhir pengolahan data apabila mendapat nilai atau bobot CR (consistency ratio) $\leq 10\%$ maka nilai atau bobot tersebut konsisten (Batto, 2024), situasi ini memungkinkan tim manajemen untuk mengambil langkah-langkah strategis yang tepat.

Dalam rangka mensistematisasi kajian maka dirumuskan tujuan kajian ini adalah; (i) melakukan identifikasi potensi pertambangan; (ii) memetakan implikasi potensi pertambangan terhadap kebijakan pendirian BUMD dalam upaya meningkatkan PAD melalui Analytical Hierarchy Process (AHP). Dengan proses yang sistematis ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang utuh terhadap keputusan pemerintah daerah dalam melakukan analisis untuk memutuskan apakah pendirina BUMD sudah memenuhi kriteria penting dalam rangka menambah pendapatan asli daerah yang pada beberapa daerah sangat bergantung dari dana darinpemerintah pusat.

TINJAUAN PUSTAKA DAN FOKUS STUDI

Peran Strategis BUMD dalam Peningkatan PAD

Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) berperan strategis dalam memperkuat kemandirian fiskal dan mendorong pembangunan ekonomi daerah melalui optimalisasi potensi lokal. Pendirian BUMD, selain sebagai sumber pendapatan, juga berfungsi menggerakkan sektor prioritas yang kurang terjangkau oleh swasta. Penelitian menunjukkan kontribusi signifikan BUMD terhadap peningkatan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan efektivitas desentralisasi fiskal (Putra et al., 2021; Syahrudi & Amalia, 2024).

Potensi Sektor Pertambangan dan Pemanfaatannya

Sektor pertambangan merupakan kontributor utama bagi perekonomian nasional dan daerah. Kabupaten Luwu Timur, dengan cadangan nikel strategis, memiliki potensi signifikan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui pengelolaan yang optimal. Data menunjukkan sektor ini menyumbang lebih dari Rp1.800 triliun dalam Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) selama dekade terakhir (Rizky Syaputra et al., 2023). Namun, pemanfaatan potensi tersebut melalui pendirian Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) masih terbatas, sehingga kontribusinya terhadap PAD belum optimal (Prasada, 2023).

Penggunaan *Analytical Hierarchy Process* (AHP) dalam Pengambilan Keputusan Kebijakan

Analytical Hierarchy Process (AHP) efektif dalam mendukung pengambilan keputusan strategis secara sistematis dan konsisten, khususnya pada kondisi keterbatasan sumber daya dan banyaknya alternatif kebijakan (Chandra & Ratnamurni, 2022). Dalam pendirian BUMD, AHP memberikan kerangka rasional untuk menetapkan prioritas strategi, termasuk pembiayaan, dukungan kebijakan, dan alokasi sumber daya (Batto, 2024; Bastrianto et al., 2024), sehingga relevan sebagai alat perumusan strategi peningkatan PAD berbasis sektor pertambangan.

Fokus studi pada kajian ini meliputi tiga aspek, yakni; (i) Penentuan Prioritas Berdasarkan *Analytical Hierarchy Process*; (ii) Proyeksi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah; dan (iii) Nilai Tambah BUMD.

METODE PENELITIAN

Metode adalah suatu cara kerja yang dapat digunakan untuk memperoleh sesuatu. Sedangkan metode penelitian dapat diartikan sebagai tata cara kerja di dalam proses penelitian, baik dalam pencarian data ataupun pengungkapan fenomena yang ada (Zulkarnaen, W., et al., 2020:229).

Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode *Analytical Hierarchy Process* (AHP), yang dipahami sebagai suatu proses penelitian untuk mendukung kebijakan atau menganalisis suatu permasalahan, sehingga dapat membantu pengambil keputusan memecahkan masalah melalui penyediaan rekomendasi yang berorientasi pada tindakan (Danim, 2000). Dalam penelitian kebijakan, fokus utama bukan pada seberapa besar bobot ilmiah hasil penelitian, melainkan pada sejauh mana temuan tersebut memiliki aplikabilitas dalam penyelesaian masalah (Nugroho, 2020), dengan penyajian yang sederhana agar memudahkan peneliti (Tohardi, 2020). Pada konteks ini, penelitian diarahkan untuk menganalisis kebutuhan daerah dan potensi pertambangan dalam rangka kebijakan pendirian BUMD guna meningkatkan pendapatan asli daerah, dengan studi kasus di Kabupaten Luwu Timur.

Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan di Kabupaten Luwu Timur, daerah yang dikelilingi dengan kawasan pertambangan berkelas dunia. Luwu Timur adalah daerah paling timur

Sulawesi Selatan yang memiliki potensi pertambangan yang dapat dimaksimalkan untuk kesejahteraan masyarakat. Saat ini, Luwu Timur telah mendirikan BUMD yang siap melakukan ekspansi di bidang pertambangan dan sektor lainnya.

Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan melalui: (i) observasi melalui pengamatan dan pencatatan terhadap data BUMD yang berkaitan dengan obyek penelitian; dan (ii) kuisioner Pengumpulan data dengan memberikan kuisioner kepada responden. Responden adalah pegawai BUMD dan pengambil kebijakan yang berjumlah 30 responden.

Analisis Data

Teknik analisis data menggunakan *Analytical Hierarchy Process* (AHP) sebagai salah satu metode yang digunakan dalam pengambilan keputusan dengan mempertimbangkan beberapa kriteria dan alternatif. Metode ini pertama kali diperkenalkan oleh Thomas Saaty pada tahun 1970 (Sianipar et al., 2024). Metode AHP adalah teori pemodelan untuk mengukur dan menemukan skala rasio perbandingan pasangan secara kontinyu maupun diskrit. Adapun alasan pemodelan ini sering digunakan, yaitu untuk membantu mengambil keputusan karena struktur hirarki mencapai hingga kriteria paling dalam, memperhitungkan kebenaran dan batas toleransi keputusan yang tidak konsisten, serta memperhitungkan ketahanan output analisis dalam mengambil keputusan (Apip Supriadi & Komarlina, Dwi Hastuti Lestari, Ardiani, 2000).

Adapun tahapan dalam AHP adalah: (i) mengidentifikasi masalah dan menentukan solusi permasalahan; (ii) menyusun struktur hierarki dari level teratas; (iii) membangun matriks perbandingan berpasangan; (iv) mendefinisikan perbandingan berpasangan; (v) menghitung nilai eigen dan menguji konsistensinya; (vi) mengulangi tahapan 3,4, dan 5 7; dan (vii) memeriksa konsistensi hierarki (Bastrianto et al., 2024).

HASIL PENELITIAN DAN DISKUSI

Penentuan Prioritas Berdasarkan *Analytical Hierarchy Process*

Pada umumnya, setiap organisasi telah memiliki perumusan strategi dengan mempertimbangkan faktor internal dan eksternal melalui pendekatan SWOT (*strengths, weaknesses, opportunities, threats*). Metode ini, yang awalnya diterapkan di sektor bisnis, kini juga digunakan secara luas dalam organisasi publik. Melalui pemetaan

dalam bentuk matriks, berbagai alternatif strategi dapat dikembangkan dengan tujuan memaksimalkan potensi dan peluang yang dimiliki, serta mengurangi kelemahan dan risiko yang dihadapi (Rohmatulloh & Winarni, 2012). Namun, banyaknya strategi yang dihasilkan menuntut proses seleksi yang cermat. Oleh karena itu, evaluasi strategi diperlukan untuk menetapkan prioritas berdasarkan tingkat kepentingan atau dampaknya.

Berdasarkan identifikasi dan analisis SWOT, diperoleh beberapa strategi, yaitu; (i) usulan pendirian BUMD PT Luwu Timur Gemilang (S1); (ii) Fasilitasi tenaga kerja untuk memperoleh sertifikasi KTT, operator alat berat, tenaga laboratorium (S2); (iii) Kerjasama dengan pihak swasta yang memiliki fasilitas smelter (S3); (iv) mempercepat kegiatan eksplorasi detail (S4); dan (v) monitoring lingkungan (S5). Dari lima strategi tersebut perlu ditentukan strategi yang menjadi prioritas dengan mempertimbangkan beberapa kriteria yaitu: (i) Pembiayaan; (ii) Resources; dan (iii) Dukungan kebijakan. Diagram penentuan prioritas strategi berdasarkan beberapa kriteria disajikan pada diagram 1.

Kemudian dilakukan analisis perbandingan diantara lima strategi yang telah dibuat. Hasil analisis perbandingan dari lima strategi yang ditawarkan diperoleh prioritas strategi sebagaimana ditampilkan pada tabel 1.

Berdasarkan tabel 1. di atas, perbandingan strategi untuk menentukan prioritas sebelum mempertimbangkan unsur-unsur pada kriteria diperoleh prioritas tertinggi yaitu strategi S1 dengan nilai 0,85 atau 28,5 persen. Sedangkan prioritas terendah adalah strategi S4 dengan nilai 0,163 atau 16,3 persen. Langkah selanjutnya dilakukan perbandingan terhadap unsur kriteria pada tabel 1. Hasil analisis perbandingan terhadap unsur kriteria disampaikan pada tabel 2.

Berdasarkan tabel 2, diperoleh nilai perbandingan tertinggi adalah dukungan kebijakan dengan nilai 0,444 atau 44,4 persen yang diikuti oleh pembiayaan dengan nilai 0,291 atau 29,1 persen, dan resources dengan nilai 0,266 atau 26,6 persen. Selanjutnya dilakukan analisis prioritas berdasarkan kriteria untuk memperoleh prioritas strategi dengan kombinasi kriteria. Hasil analisis prioritas strategi peningkatan PAD di Luwu Timur dengan mempertimbangkan beberapa kriteria ditampilkan pada gambar 2.

Gambar 2 menunjukkan hasil analisis prioritas dari lima strategi yang ditawarkan dengan mempertimbangkan kriteria pembiayaan, resources, dan dukungan

kebijakan. Hasil analisis tersebut diperoleh strategi S1 dengan nilai 0,285 atau 28,5 persen, strategi S2 dengan nilai 0,212 atau 21,2 persen, strategi S3 dengan nilai 0,164 atau 16,4, strategi S4 dengan nilai 0,164 atau 16,4 persen, dan strategi S5 dengan nilai 0,175 atau 17,5 persen. Nilai inkonsistensi dari kombinasi kriteria terhadap strategi yang ditawarkan adalah 0,00 atau tingkat konsistensi mencapai 100%. Berdasarkan hasil analisis dan nilai eigen masing-masing strategi, maka dapat disusun strategi prioritas seperti disajikan pada Tabel 3. Berdasarkan tabel 3, prioritas strategi peningkatan pendapatan asli daerah di wilayah konsesi tambang secara berturut-turut yaitu strategi S1, strategi S2, strategi S5, strategi S3, dan strategi S4.

Diskusi

Analisis Kebutuhan dan Strategi

Berdasarkan *Analytical Hierarchy Process* pada tabel 1. tiga besar strategi yang dibutuhkan secara prioritas dan berurutan adalah (i) pendirian BUMD; (ii) penyediaan fasilitas tenaga kerja; (iii) monitoring lingkungan. AHP merupakan salah satu metode yang sangat bermanfaat dalam proses pengambilan keputusan yang rumit, terutama ketika terdapat banyak aspek yang harus dipertimbangkan. Metode ini menyusun masalah ke dalam bentuk hierarki, sehingga masalah besar dapat diuraikan menjadi bagian-bagian yang lebih kecil dan mudah dikelola. Melalui perbandingan berpasangan, AHP membantu menetapkan prioritas secara logis.

Walaupun memiliki beberapa keterbatasan, kemampuan AHP dalam menangani keputusan yang melibatkan banyak kriteria menjadikannya tetap sebagai salah satu teknik pengambilan keputusan yang paling efektif dan banyak dimanfaatkan di berbagai sektor. Tiga skenario prioritas yang dapat diterapkan oleh Pemerintah Kabupaten Luwu Timur adalah:

Skenario 1 adalah dengan mempercepat pendirian BUMD di kabupaten Luwu Timur. Skenario ini ditindaklanjuti dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pendirian Perseroan Terbatas Luwu Timur Gemilang. Pemerintah daerah Pemerintah daerah mengalokasikan penyertaan modal tahap awal sebesar 5 miliar rupiah kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT Luwu Timur Gemilang pada tahun 2024. Kebijakan ini merupakan langkah strategis dalam mendorong pengelolaan sumber daya alam yang profesional serta memperkuat kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Skenario 2 fasilitasi peningkatan

kapasitas tenaga kerja di daerah menjadi penting, khususnya dalam memahami Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 yang mengatur tata kelola aset dan pengawasan berdasarkan prinsip akuntabilitas. Di sisi lain, implementasi Permendagri Nomor 118 Tahun 2018, yang mewajibkan transformasi bentuk hukum BUMD, kerap terkendala oleh keterbatasan sumber daya manusia yang memiliki keahlian di bidang administrasi hukum perusahaan. Skenario 3 monitoring lingkungan, sebagai salah satu komitmen keberlanjutan lingkungan. Sistem pemantauan lingkungan berfungsi untuk mengumpulkan dan menganalisis data guna mengetahui kondisi lingkungan terkini, melacak perubahan yang terjadi dari waktu ke waktu, mengidentifikasi potensi permasalahan, serta memperkirakan situasi lingkungan di masa mendatang. Apalagi, Luwu Timur memiliki beberapa kawasan tambang yang harus diperhatikan keberlanjutan lingkungannya.

Skenario ini misalnya juga digunakan dalam menentukan lokasi sentra tembakau (Sukardi et al., 2023), juga bagaimana memetakan UMKM sebagai sektor jasa, industri pariwisata dinyakini akan menciptakan *income multiplication* (Ismail et al., 2021). Jadi, AHP sangat penting dijalankan oleh instansi pemerintah maupun swasta untuk menentukan prioritas kerja yang harus dilakukan pada kurun waktu tertentu. Prioritas ini penting mengingat pada awal dimulainya sebuah organisasi pasti memiliki sumberdaya yang masih sedikit.

Proyeksi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah

Peranan sektor ekonomi Kabupaten Luwu Timur dapat dilihat pada nilai PDRB atas dasar harga berlaku pada tahun 2020 mencapai 21,5 trilyun rupiah. Secara nominal, nilai PDRB ini mengalami kenaikan sebesar 535,6 milyar rupiah dibandingkan dengan tahun 2019 yang mencapai 21 trilyun rupiah. Naiknya nilai PDRB ini dipengaruhi oleh meningkatnya produksi di seluruh lapangan usaha dan adanya inflasi.

Kontribusi kategori Pertambangan dan Penggalian terhadap PDRB pada tahun 2020 atas dasar harga berlaku mencapai 9,7 trilyun rupiah atau sebesar 44,95%. Pertumbuhan ekonomi pada kategori Pertambangan dan Penggalian menurun selama tahun 2016-2019. Pada tahun 2020, pertumbuhan kategori ini meningkat sebesar 1,66%. Angka tersebut menduduki peringkat kedua dalam menyumbang besaran PDRB Kabupaten Luwu Timur, sebagaimana pada grafik 1.

Data realisasi PAD Kabupaten Luwu Timur tahun 2021 sebesar Rp 375,5 milyar

bersumber dari pendapatan asli daerah sebesar Rp 166,5 milyar, pendapatan transfer (pusat dan provinsi) sebesar Rp 159,1 milyar dan pendapatan lain daerah yang sah yang bersumber dari PT. Vale Indonesia, Tbk (hibah listrik dan scrap) sebesar Rp 49,96 milyar. Angka ini menunjukkan bahwa kontribusi PT. Vale Indonesia, Tbk sebagai sumber PAD Kabupaten Luwu Timur dari sektor pertambangan cukup berpengaruh signifikan yakni pada tahun 2021 sebanyak 13,31%.

Nilai Tambah BUMD

Proyeksi Kontribusi Kebijakan Pendirian BUMD terhadap PAD dengan kegiatan utama sektor pertambangan dapat memberi kontribusi terhadap PAD Kabupaten Luwu Timur dengan kisaran 24,48%/tahun hingga 33,2%/tahun. Dengan rincian: (i) Rata-rata penerimaan kegiatan penambangan di blok Pongkeru adalah Rp 272,20 milyar/tahun dengan rata-rata kontribusi terhadap PAD Kabupaten Luwu Timur sebesar 33,2%/tahun; (ii) Rata-rata penerimaan kegiatan penambangan di blok Bulubalang adalah Rp 223,58 milyar/tahun dengan rata-rata kontribusi terhadap PAD Kabupaten Luwu Timur sebesar 28,9%/tahun; dan (iii) Rata-rata penerimaan kegiatan penambangan di blok Lingke Utara adalah Rp 190,08 milyar/tahun dengan rata-rata kontribusi terhadap PAD Kabupaten Luwu Timur sebesar 24,48%/tahun (*Sumber Data: Setda Kab. Luwu Timur*).

Data ini memberi gambaran bahwa pengelolaan sumber daya mineral nikel di Kabupaten Luwu Timur khususnya di blok Pongkeru, blok Bulubalang dan blok Lingke Utara oleh BUMD akan jauh lebih besar bila dibandingkan dengan pengelolaan sumber daya mineral nikel oleh pihak lain. Sebagai gambaran, data realisasi penerimaan daerah Kabupaten Luwu Timur tahun 2021 sebesar Rp 375,5 milyar dari pendapatan lain daerah yang sah yaitu dari PT. Vale Indonesia, Tbk (hibah listrik dan scrap) sebesar Rp 49,96 milyar atau sekitar 13,31% terhadap PAD Kabupaten Luwu Timur.

Trend Permintaan dan Penawaran ditunjukkan dengan trend positif produksi nikel dunia pada periode 2020-2023 dengan laju pertumbuhan sekitar 7,97%/thn. Sementara konsumsi nikel tumbuh sekitar 7%/thn. Berdasarkan data kementerian ESDM tahun 2019, menunjukkan bahwa permintaan nikel global pada tahun 2040 akan melebihi 4 juta ton (Wood Mackenzie) dan permintaan sector baterai akan meningkat dari 163.000 ton menjadi 1,22 juta ton. Bila dihubungkan dengan potensi cadangan nikel di WIUPK blok Pongkeru, blok Lingke Utara dan Blok Bulubalang dengan luas

WIUPK adalah 7137.48 ha dengan total cadangan sebanyak 513,9 juta metrik ton, maka kebutuhan nikel global dan potensi ketersediaan nikel di WIUPK blok Pongkeru, blok Lingke Utara dan Blok Bulubalang, menjadi prospek pasar nikel yang potensial. Estimasi cadangan Ni disajikan pada tabel 4.

Berdasarkan stratigrafi mineralisasi logam nikel di Kabupaten Luwu Timur, ketebalan ore nikel (limonit dan saprolite) adalah 9-12 meter (PT. Vale Indonesia, 2021), sehingga diperoleh perhitungan cadangan ore nikel di WIUPK eksplorasi blok Pongkeru, blok Lingke Utara dan blok Bulubalang Luwu Timur diperkirakan sebanyak 1,03 milyar mt. Strategi pemasaran produksi (ore) Ni blok Pongkeru, blok Lingke Utara dan Blok Bulubalang antara lain adalah ore nikel yang dihasilkan memiliki kadar 1,8% dan memprioritaskan pada segmen pasar local yaitu daerah yang memiliki fasilitas smelter seperti smelter yang berada di Kabupaten Bantaeng Provinsi Sulawesi Selatan, smelter di Kabupaten Morowali Provinsi Sulawesi Tengah dan smelter di Provinsi Konawe Provinsi Sulawesi Tenggara (Tangmallun et al., 2024).

Dari data yang telah diuraikan, pertambangan merupakan salah satu sektor yang sangat berpeluang untuk dikembangkan investasinya dan memberikan peluang terhadap peningkatan pendapatan asli daerah (Ibnu Fauzi Akbar et al., 2023). Di samping perannya dalam meningkatkan PAD, industri pertambangan juga memberikan dampak ekonomi langsung melalui penyediaan lapangan kerja. Perusahaan tambang skala besar di Indonesia menyerap ribuan tenaga kerja lokal, baik secara langsung maupun melalui jaringan rantai pasok dan sektor penunjang lainnya. Kesempatan kerja ini turut berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat di sekitar area pertambangan. Dengan adanya sumber penghasilan yang lebih stabil, masyarakat setempat memiliki peluang untuk meningkatkan taraf hidup mereka.

UCAPAN TERIMA KASIH

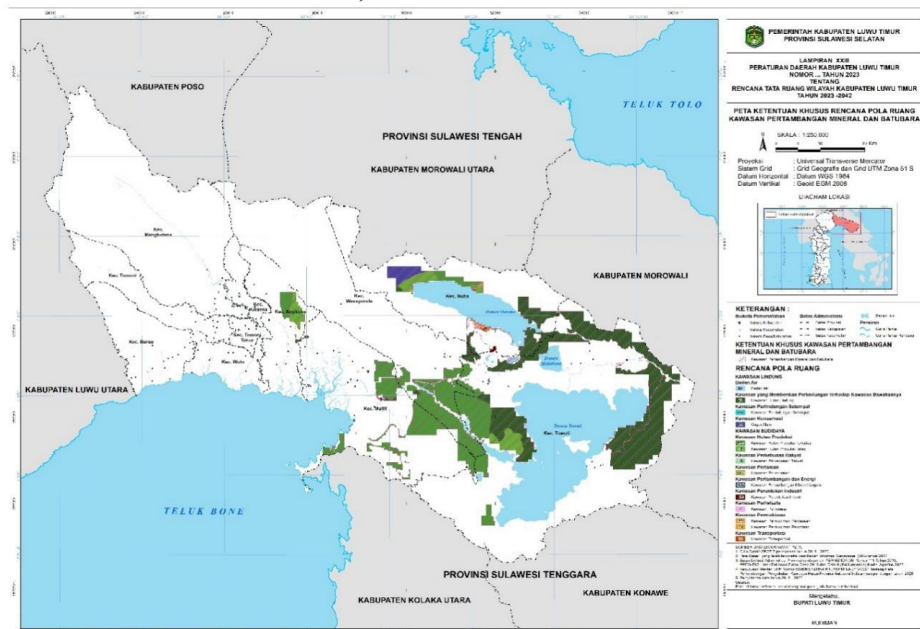
Penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada Pemerintah Kabupaten Luwu Timur, Universitas Muhammadiyah Palopo, serta seluruh pihak yang telah memberikan dukungan dalam bentuk data, informasi, maupun masukan akademik, sehingga penelitian ini dapat terselesaikan dengan baik. Ucapan terima kasih juga ditujukan kepada para responden dan pihak BUMD yang telah meluangkan waktu dalam pengisian kuesioner dan diskusi, sehingga hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi nyata bagi pengembangan kebijakan daerah.

DAFTAR PUSTAKA

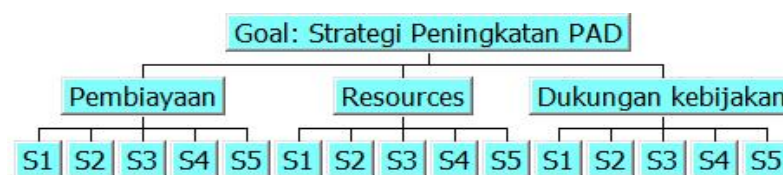
- Apip Supriadi, A. R., & Komarlina, Dwi Hastuti Lestari, Ardiani, G. T. (2000). *Analytical Hierarchy Process*.
- Bastrianto, R. W., Wijaya, A. P., & Firdaus, H. S. (2024). Analisis Potensi Kawasan Industri dengan Fuzzy Analytical Hierarchy Process Berbasis Sistem Informasi Geografis (Studi Kasus: Kabupaten Madiun). *JGISE: Journal of Geospatial Information Science and Engineering*, 7(1), 81–90.
- Batto, O. (2024). Analisis Prioritas Penyedia Jasa Konstruksi Menggunakan Metode AHP (Analytical Hierarchy Process). *Jurnal Teknik AMATA*, 5(1), 32–38.
- Chandra, N., & Ratnamurni, E. D. (2022). Pengendalian Kualitas Produk Tahu dengan Metode Analytical Hierarchy Process (AHP). *INOBIIS: Jurnal Inovasi Bisnis Dan Manajemen Indonesia*, 5(3), 369–383.
- Daerah, A., Di, P. A. D., & Sumatera, P. (2022). *1, 2 1,2. 1*(7), 1887–1896.
- Danim, S. (2000). Pengantar Studi Penelitian Kebijakan, Edisi Pertama. *Cetakan Pertama. Jakarta: Bumi Aksara*.
- Ibnu Fauzi Akbar, M., Aksa, K., Yahya, I., & Anggraini, N. (2023). Pemetaan Potensi Wilayah Sebagai Peluang Investasi Dalam Pengembangan Ekonomi di Kabupaten Luwu Timur. *Journal of Urban Planning Studies*, 3(2), 184–192. <https://doi.org/10.35965/jups.v3i2.374>
- Ismail, T., Sukiani, S., Azwardi, A., Sukanto, S., Bashir, A., & Ria, S. D. (2021). Rencana Aksi Pengembangan Pariwisata Melalui Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Kabupaten Muara Enim. *Jurnal Integritas Serasan Sekundang*, 3(1), 4–28.
- Nugroho, R. (2020). *Public Policy*. Elex Media Komputindo.
- Prasada, I. Y. (2023). Pendampingan Penyusunan Rencana Bisnis Perdagangan Beras PT. Aneka Usaha Kebumen Jaya (Perseroda). *Jurnal Bakti Masyarakat Indonesia*.
- Putra, H., Koeswara, H., & ... (2021). Evaluasi Kebijakan Provinsi Sumatera Barat Tentang Pendirian BUMD PT. BALAIRUNG CITRAJAYA SUMBAR. *Jurnal Politik*
- Rizky Syaputra, S., Andyono Broto Santoso, S., Nofrohu Retongga, R., Lia Alfianita, A., Mu'awanah, F. R., & Heriyadi, N. W. A. A. T. (2023). Analisis Peran Sektor Pertambangan dalam Pembangunan Regional Berkelanjutan di Provinsi Sumatera Selatan dengan Menerapkan Pendekatan Analisis Model Input-Ouput. *Jurnal Teknologi*, 16(1), 37–47.
- Rohmatulloh, & Winarni, S. (2012). Evaluasi Prioritas Strategi SWOT dengan Analytical Hierarchy Process. *Prosiding Peranan Statistika Di Bidang Pemasaran Dalam Penyusunan Strategi Bisnis, October*, 1–8. <https://doi.org/10.13140/RG.2.1.1628.4565>
- Siahaan, S. D. N., Putriku, A. E., & Saragih, L. S. (2022). *Pengenalan Bisnis Teori dan Praktik*. books.google.com.
- Sianipar, B., Hasugian, P. S., & Tarigan, D. (2024). Evaluasi Kriteria Pemilihan Lokasi Pembangunan Perumahan Baru dengan Menggunakan Metode Analisis Hirarki Process (AHP). *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4(1), 10147–10155.
- Sukardi, L., Tajidan, T., & Fahrudin, F. (2023). Penentuan Lokasi Sentra Industri Hasil Tembakau (SIHT) dan Strategi Pengembangannya Di Kabupaten Lombok Barat. *AGROTEKSOS*, 33(3), 919–928.
- Syahrudi, A. F., & Amalia, S. (2024). Belanja Daerah, Dividen Penyertaan Modal, dan Dampaknya pada Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kutai Timur. *Indonesian Journal of Humanities and Social Sciences*, 5(2), 563–580.
- Tangmallun, S., Anwar, S. M., Pajariato, H., & Tahier, I. (2024). Analysis Of Regional Needs

- And Mining Potential In The Policy on Establishing BUMDs TO INCREASE REGIONAL ORIGINAL INCOME. *Advanced International Journal of Business, Entrepreneurship and SMEs*, 6(22), 177–192. <https://doi.org/10.35631/aijbes.622013>
- Tohardi, A. (2020). Model Penelitian Kebijakan Kualitatif” Tohardi”. *JPASDEV: Journal of Public Administration and Sociology of Development*, 1(1), 58–77.
- Yanto, A., Salbilla, F., Sitakar, R. C., Hukum, F., Belitung, U. B., Daerah, O., Daerah, P. A., & Timah, P. (2023). Implikasi Resentralisasi Kewenangan Pertambangan Timah Terhadap Potensi Pendapatan Daerah Di Bangka Belitung. *Jurnal Interpretasi Hukum*, 4(2), 344–357.
- Zulkarnaen, W., Fitriani, I., & Yuningsih, N. (2020). Pengembangan Supply Chain Management Dalam Pengelolaan Distribusi Logistik Pemilu Yang Lebih Tepat Jenis, Tepat Jumlah Dan Tepat Waktu Berbasis Human Resources Competency Development Di KPU Jawa Barat. *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi)*, 4(2), 222-243. <https://doi.org/10.31955/mea.vol4.iss2.pp222-243>.

GAMBAR, GRAFIK DAN TABEL



Gambar 1. Peta Kawasan Pertambangan
Sumber: RTRW Luwu Timur, 2023-2042)



Gambar 1. Diagram penentuan prioritas berdasarkan kriteria
Sumber: Analisis Data

Tabel 1. Nilai perbandingan antar strategi

No.	Strategi	Nilai Eigen
1.	S1: Usulan pendirian BUMD PT Luwu Timur Gemilang (Perseroda)	0,287
2.	S2: Fasilitasi tenaga kerja untuk memperoleh sertifikasi KTT, operator alat berat, tenaga laboratorium dll	0,211
3.	S5: Monitoring lingkungan	0,174
4.	S3: Kerjasama dengan pihak swasta yang memiliki fasilitas smelter	0.164

5. S4: Mempercepat kegiatan eksplorasi detail 0,163

Sumber: Analisis Data

Tabel 2. Nilai perbandingan antar kriteria

No.	Kriteria	Nilai Eigen
1.	Dukungan kebijakan	0,444
2.	Pembiayaan	0,291
3.	Resources	0,266

Sumber: Analisis Data

Combined instance -- Synthesis with respect to:

Goal: Strategi Peningkatan PAD

Overall Inconsistency = .00



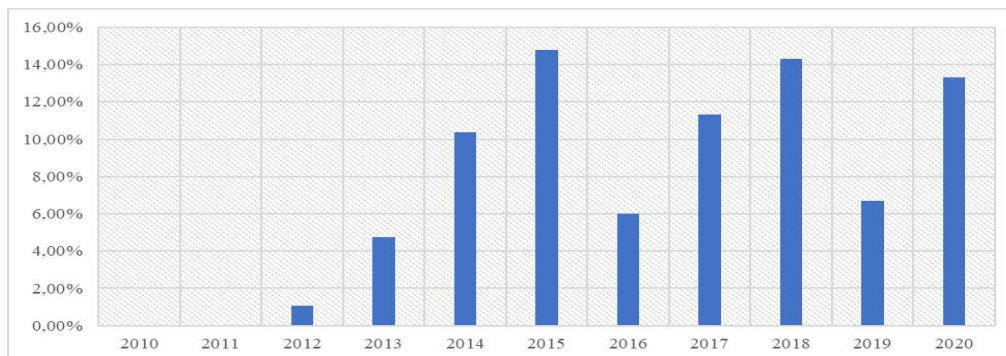
Gambar. 2. Hasil analisis prioritas strategi dengan kombinasi kriteria

Sumber: Analisis Data

Tabel 3. Prioritas Strategi Berdasarkan Kriteria

No.	Strategi	Nilai	Prioritas
1.	Usulan pendirian BUMD PT Luwu Timur Gemilang (Perseroda)	0,285	1
2.	Fasilitasi tenaga kerja untuk memperoleh sertifikasi KTT, operator alat berat, tenaga laboratorium dll	0,211	2
3.	Kerjasama dengan pihak swasta yang memiliki fasilitas smelter	0,164	4
4.	Mempercepat kegiatan eksplorasi detail	0,163	5
5.	Monitoring lingkungan	0,174	3

Sumber: Analisis Data



Grafik 1. Perkembangan Kontribusi Pendapatan PT. Vale Indonesia

Sumber: <https://www.scribd.com/document/512636049/2020-Annual-Report-PT-Vale-Indonesia-Tbk>

Tabel 4. Estimasi Cadangan Ni di blok Pongkeru, Lingke Utara dan Bulubalang

Blok	Luas WIUP (ha)	cadangan ore (kedalaman 9-12 m) mt	Asumsi Produksi 50% dari cadangan (mt)
Blok Pongkeru	4527.97	652,027,680.0	326,013,840.0
Blok Lingke Utara	943	135,792,000.0	67,896,000.0
Blok Bulubalang	1666.51	239,977,440.0	119,988,720.0
Jumlah	7137.48	1,027,797,120.0	513,898,560.0

Sumber: (Tangmallun et al., 2024)